iv

# ABSTRAK

Gagasan federalisme di Indonesia hingga kini masih kurang populer di tengah masyarakat Indonesia, bahkan mayoritas *founding fathers* menolak bentuk negara federal ketika merumuskan pendirian negara Indonesia. Apalagi pengalaman buruk Indonesia yang pernah menerapkan federalistik dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 yang hanya bertahan selama 8 bulan, semakin menempatkan gagasan federalisme dalam paradigma negatif sebagian besar bangsa Indonesia. Namun, ketika Indonesia pada masa peralihan reformasi, bangsa Indonesia justru mengalami kebimbangan melihat realitas rezim Orde Baru yang membawa nafas kesatuan atau *unity* tetapi lebih condong pada praktik uniformitas dan sentralistik di tengah masyarakat Indonesia yang plural, salah satunya melalui kekuatan militeristik. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab reformasi kala itu membawa semangat otonomi seluas-luasnya untuk daerah. Sehingga seharusnya menjadi diskursus yang menarik, bagaimana wacana perubahan bentuk negara untuk Indonesia relevan atau tidak untuk menjadi solusi mengatasi atas segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi untuk menjadi pisau analisis, terkhusus teori demokrasi pluralis milik Robert Dahl yang menentang tirani mayoritas dipadukan dengan demokrasi ala Mohammad Hatta yang menekankan demokrasi asli Indonesia yakni demokrasi desa. Teori demokrasi pluralis ini sangat relevan dengan konteks federalisme yang menghargai kepentingan-kepentingan di pelbagai daerah di suatu negara, kemudian demokrasi desa yang sangat relevan dengan konteks demokrasi untuk Indonesia.

Hasil penelitian ini menemukan konklusi rasionalisasi dari bentuk negara federal untuk Indonesia yang ternyata rasional tetapi dalam konteks wacana di masa yang akan datang dan bukan urgensi saat ini. Kemudian secara historis juga ditemukan realitas keadaan kondisi bangsa dan negara Indonesia terkait dengan bentuk negara, seperti indikasi bahwa Kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai peradaban agung nenek moyang bangsa Indonesia ternyata sistem kekuasaannya sangat mendekati konsep federasi. Adapun kini pasca reformasi dengan kondisi geografis wilayah yang sangat luas dengan banyak pulau, Indonesia tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan namun didesentralisasi dengan segudang dilema dan permasalahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang majemuk di pelbagai daerah.

# Kata Kunci: Rasionalitas, Federalisme, Otonomi Daerah.